

Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor

Salehudin¹, Rani Maswati², & Samar³

^{1,2,3} Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik YAPIS Biak Papua

ARTICLE INFO

Article History:

Received 25 Oktober 2021

Revised 28 Desember 2021

Accepted 28 Desember 2021

Published 30 Desember 2021

Keywords:

Role of Government;

Empowerment;

UMKM.

ABSTRACT

The role of government in community empowerment is very much needed. This study aims to determine the role of the government in empowering MSMEs of indigenous Papuans in the Biak Numfor Regency. This research is a qualitative descriptive study. In an effort to present a comprehensive understanding, this research uses a qualitative approach. The techniques used in collecting data in this study include; observation, interview, and documentation. The data analysis in this research is using qualitative descriptive data analysis. The results of the study indicate that the role of the government in empowering MSMEs of indigenous Papuans in Biak Numfor Regency is through training, business capital assistance, promotion and marketing assistance, and production equipment assistance. The inhibiting factors in empowering MSMEs of indigenous Papuans in Biak Numfor Regency are the lack of entrepreneurial knowledge and lack of facilities and infrastructure.

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat sangat dibutuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM orang asli Papua Kabupaten di Biak Numfor. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam upaya menyajikan pemahaman yang menyeluruh maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM orang asli Papua Kabupaten di Biak Numfor yaitu, melalui pelatihan, bantuan modal usaha, bantuan promosi dan pemasaran, serta bantuan alat produksi. Adapun faktor penghambat dalam pemberdayaan UMKM orang asli Papua Kabupaten di Biak Numfor yaitu, kurangnya pengetahuan berwirausaha dan kurangnya sarana dan prasarana.



© 2021 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Salehudin,

Email: Salehuddinalan@gmail.com

How to Cite: Salehudin, Maswati, R., Samar. (2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UMKM orang asli papua (OAP) di Kabupaten Biak Numfor. *Sosio e-Kons*, 13 (3), 243-250

PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan bagian dari konsep pembangunan dalam ekonomi dan politik yaitu upaya membangun daya masyarakat, dengan mendorong dan memberikan motivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya kearah yang baik (Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono 2013). Dalam konteks pemberdayaan, paradigma memiliki peran untuk membentuk apa yang kita lihat, bagaimana cara kita melihat suatu masalah, apa yang kita anggap sebagai masalah ketidakberdayaan itu, apa masalah yang kita anggap bermanfaat untuk dipecahkan serta metode apa yang kita gunakan untuk meneliti dan melakukan intervensi atas masalah tersebut (Musa 2017).

Faktor yang lebih dominan yang mempengaruhi persoalan dari segi kemanusiaan dan pembangunan, seperti keterbelakangan, kebodohan, ketelantaran, kematian dini, buta huruf, anak putus sekolah (Safri Miradj 2014). Kebijakan program pemerintah di era orde baru dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak berjalan optimal karena program tersebut selain tidak mampu memberikan outcome bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat juga pendekatan yang digunakan adalah top down yang segalanya bersumber pada pemerintah, dengan demikian masyarakat hanyalah sebagai obyek pembangunan saja (Ras 2013). lanjut (Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah 2017) peran pemerintah sangat perlu dalam pembinaan mikro sehingga dapat dirumuskan disesuaikan dengan lingkungan dan pencapaian usaha, tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar UMKM mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, fungsi pemerintah sebagai regulator adalah membuat kebijakan-kebijakan sehingga mempermudah usaha UKM dalam mengembangkan usahanya. Pemberdayaan sangat penting untuk dilakukan dalam pembangunan masyarakat (Edyanto 2018).

Menurut (Christofer Ondang, Frans Singkoh 2019) pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya untuk didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Perekonomian yang berbasis usaha mikro, kecil dan menengah memiliki banyak kelebihan, mampu mendorong orang bekerja keras, disiplin tinggi dan meningkatkan daya kreativitas dan inovasi bagi masyarakat yang ingin memiliki penghasilan lebih tinggi (Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah 2017). Menurut (Dwi Prasetyo Hadi 2015) dalam perkembangannya UMKM mengalami kendala. Kendala tersebut biasanya berbeda dari satu daerah dengan daerah yang lain. Lebih lanjut, pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam pemberdayaan UMKM disamping mengembangkan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber daya manusianya (Dewi Wuryandani 2013).

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki posisi penting terhadap pembangunan ekonomi di daerah, oleh sebab itu pemerintah daerah seharusnya memberikan perhatian bagi perkembangan UMKM. Lebih lanjut, usaha mikro, kecil dan menengah mampu menunjukkan kemampuannya dalam menyerap lapangan kerja, akan tetapi peran dari pemerintah daerah dalam mewujudkan iklim yang baik untuk UMKM belum sepenuhnya terwujud dilihat dari strategi serta penyusunan kebijakan publik yang belum berpihak terhadap UMKM (Christofer Ondang, Frans Singkoh 2019). Menurut (Leiwakabessy and Lahallo 2019) Peran pemerintah dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang sangat diperlukan.

Menurut (Dewi Wuryandani 2013) terdapat beberapa masalah umum yang dihadapi oleh UMKM dalam pengembangan usahanya, antara lain: pemasaran, modal dan pendanaan, inovasi dan pemanfaatan teknologi informasi, pemakaian bahan baku, peralatan produksi, penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, rencana pengembangan usaha, kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Adapun permasalahan yang dihadapi UMKM di Kabupaten Biak Numfor yaitu, rendahnya SDM baik dalam pengelolaan manajemen maupun dalam pengembangan usahanya, hal itu menyebabkan koperasi dan para pelaku wirausaha di Biak Numfor masih tertinggal dibandingkan dengan lembaga keuangan atau pelaku ekonomi lainnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam upaya menyajikan pemahaman yang menyeluruh maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek secara alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Penelitian ini bersifat deskriptif. Karena peneliti di sini berusaha menggambarkan fakta-fakta tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan UMKM orang asli Papua Kabupaten di Biak Numfor. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Koperasi pemerintah Kabupaten Biak Numfor. Subyek Penelitian ini adalah orang asli Papua yang memiliki UMKM di Kabupaten Biak Numfor. Adapun subyek dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik, *purposive sampling*. Teknik yang

digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini antara lain; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan UKM Orang Asli Papua Di Kabupaten Biak Numfor

Usaha kecil merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia, karena hal ini terlihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap. Selain itu, tidak dapat disangkal bahwa pengusaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pelaku bisnis di Indonesia mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam pembangunan struktur perekonomian nasional. Oleh karena itu, berbagai upaya pemberdayaan perlu dilakukan baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak beberapa waktu yang lalu, banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, akan tetapi sektor UKM terbukti masih bertahan dan tetap tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi tersebut.

Secara umum usaha kecil memiliki karakteristik sebagai usaha yang tergolong lemah baik dari aspek pengetahuan, keterampilan, teknologi yang digunakan, permodalan, pemasaran, promosi dan juga kerja sama masih rendah. Oleh karena usaha ini perlu diberdayakan untuk mampu bersaing dan mandiri. Upaya untuk memberdayakan usaha kecil dimulai dari analisis kebutuhan dan masalah yang dihadapi para pengusaha kecil tersebut, perlu juga dipahami apa potensi yang bisa dikembangkan. Apakah usahanya memiliki keunggulan atau kekhasan yang bisa menjadi daya tarik dan diferensiasi bagi produk kompetitif lainnya. Pengembangan usaha kecil juga perlu diperhatikan potensi lokal dan kearifan-kearifan lokal. Hal ini jika dipertahankan justru akan menjadi nilai kekhasan dan menjadi daya tarik dan memiliki nilai jual tinggi.

Suksenya pemberdayaan dalam masyarakat tergantung pada agen pemberdayaan, bagaimana agen pemberdayaan dapat menganalisis kelemahan serta potensi yang ada pada setiap program pemberdayaan dapat tepat sasaran selanjutnya dapat mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada pada UKM sehingga UKM dapat secara mandiri menjalankan usahanya. Oleh sebab itu, tantangan selanjutnya didayagunakan dan dikembangkan secara maksimal guna meningkatkan kinerja dan daya saing UKM. Pemberdayaan usaha kecil yang utama adalah bagaimana membangun SDM yang tangguh, yaitu dengan cara mendorong kemampuan berfikir dan berperilaku inovatif serta diperlukannya keterampilan dan kemampuan dalam aspek managerial, pengelolaan keuangan, pemasaran, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Pengusaha kecil juga perlu mendapatkan pencerahan tentang perbankan, sehingga mereka bisa penambahan modal usaha.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai. Untuk mendapatkan gambaran mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, maka peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan pihak Dinas koperasi dan usaha kecil menengah kabupaten Biak Nunfor serta dengan pelaku UKM orang asli Papua. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka ada beberapa informasi yang diperoleh mengenai peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor, yaitu:

1. Penyuluhan atau Pelatihan

Pengembangan sumber daya manusia sangat penting untuk dilakukan demi kemajuan suatu usaha. Penyuluhan atau pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dilakukan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan setiap satu tahun sekali.

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Dinas koperasi dan UKM kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

".....Pelatihan itu tidak pernah berhenti kami lakukan, pola pembinaan itu tidak pernah berhenti bahkan kemarin saya usulkan kepada pak bupati untuk membentuk perusda agar hasil-hasil usaha orang asli papua dipasarkan oleh perusda, bagaimana mereka memproduksi nanti perusda yang pasarkan, pokoknya semua kami bantu mulai dari alat produksi, modal usaha, pelatihan sampai pemasaran pun dibantu oleh pemerintah ." (Hasil wawancara 16 September 2021).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan informan staf Dinas koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa:

".....Pelatihan kewirausahaan itu sangat penting, karena kami mau melihat bagaimana pelaku usaha orang asli papua berkembang, pemerintah datangkan pemateri dari luar dan berkompeten untuk memberikan materi terutama materi tentang kewirausahaan itu sangat penting sekali". (Hasil wawancara 6 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh informasi bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor memberikan pelatihan pelaku usaha orang asli Papua setiap satu tahun sekali. Pelatihan yang dilakukan dengan mendatangkan pemateri atau narasumber yang berkompeten dalam memberikan materi-materi tentang UKM, adapun materi- materi tentang UKM diantaranya materi kiat-kiat menumbuhkan usaha serta mengembangkan usaha. Adapun materi pelatihan yang diberikan dimaksudkan untuk memberikan pencerahan pemikiran masyarakat sehingga dapat berinovasi dengan produk yang sudah ada, sehingga nantinya produk-produk yang dihasilkan bisa bersaing.

Salah satu program yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah mengutamakan pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) orang asli Papua, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor senantiasa mendorong dan menumbuhkan kekuatan ekonomi lokal serta mengarah pada UKM yang mengarah dan berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor sangat memahami bahwa kegiatan UKM merupakan salah satu faktor pendorong utama dalam membangun ekonomi orang asli Papua. Sektor UKM merupakan salah satu alternatif terbaik dalam menciptakan lapangan dan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi orang asli Papua.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor sudah cukup bagus, karena memberikan pengetahuan yang lebih banyak kepada pelaku usaha dalam mengelola usahanya tersebut. Pemberian pelatihan bagi pelaku usaha sangat banyak mendatangkan manfaat bagi pelaku UMKM karena mampu meningkatkan dalam proses produksi maupun manajerial. Produktivitas dapat meningkat apabila keterampilan dalam proses produksi juga meningkat. Selain itu pelatihan manajerial dapat meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah yang dihadapi sehingga mampu menghadapi masalah yang sedang dihadapi sehingga hal-hal yang mengganggu dalam produktivitas dapat segera diatasi, adapun produktivitas disini tidak hanya soal kuantitas melainkan juga kualitas.

Sumber daya manusia adalah aspek terpenting dalam melakukan usaha oleh sebab dibutuhkan pelatihan dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

2. Bantuan Modal Usaha

Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam upaya mendukung kegiatan pelaku usaha orang asli Papua dengan memberikan bantuan modal usaha. Pemberian bantuan dilakukan untuk mengembangkan usaha orang asli Papua.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;

”..... Bagi saya sebagai pedagang kecil bantuan pemerintah ini sangat bermanfaat dan membantu kelangsungan usaha saya. Secara pribadi saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas kepeduliannya kepada masyarakat”. (Hasil wawancara 12 September 2021).

Lebih lanjut, hasil wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor mengemukakan bahwa;

”.....Selama ini kita bantu uang yang berasal dari dinas koperasi, adapun bantuan peralatan dari dinas perikanan”. (Hasil wawancara (Hasil wawancara 16 September 2021)).

Pemberian bantuan modal untuk UKM orang asli Papua adalah untuk meningkatkan produksi seperti memilih bahan baku dengan kualitas lebih baik atau memperbanyak tenaga kerja agar hasil produksi dapat lebih maksimal secara kuantitas maupun kualitas. Disamping itu, pemberian bantuan modal usaha diberikan untuk mendanai sarana dan prasarana yang dimiliki. Kepemilikan sarana dan prasarana yang baik akan mengakibatkan aspek lain mengalami peningkatan. Beberapa pelaku usaha orang asli Papua yang memperoleh dana bantuan usaha digunakan untuk menambah kas usaha. Dalam hal ini, mereka menggunakan dana bantuan usaha tersebut sebagai cadangan sehingga kelak ketika menginginkan sebuah tindakan sudah memiliki cadangan berupa kas usaha.

3. Bantuan promosi dan pemasaran.

Salah satu upaya Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor untuk pengembangan UKM orang asli Papua adalah melalui pelatihan kewirausahaan yaitu pengetahuan tentang cara menjangkau pasar yang potensial, kemudian membantu pelaku usaha untuk mempromosikan produk yang telah dihasilkan.

Dalam mengelola sebuah usaha keberadaan bagian promosi sangat penting. Promosi merupakan serangkaian kegiatan untuk mengkomunikasikan, memberikan pengetahuan dan meyakinkan orang tentang suatu produk agar mengetahui kehebatan produk tersebut, membeli dan memakai produk tersebut, juga mengikat pikiran dan perasaannya terhadap produk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu kepala Dinas Koperasi dan UKM mengemukakan bahwa;

”.....Senantiasa pemerintah membantu promosi produksi orang asli Papua, karena pengetahuan orang Papua tentang berwirausaha sangat minim, tidak seperti orang-orang pendatang baik dari Sulawesi maupun dari Jawa mereka sudah faham”. (Hasil wawancara 16 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;

”.....Saya melihat bahwa dukungan pemerintah daerah kepada orang asli Papua sangat besar mulai dari bantuan modal termasuk juga pemasaran. Saya sangat berterima kasih kepada pemerintah atas bantuannya kepada masyarakat”. (Hasil wawancara 12 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan diperoleh informasi bahwa Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor senantiasa membantu promosi dan pemasaran dari hasil produksi pelaku usaha orang asli Papua.

4. Bantuan Alat produksi

Pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor senantiasa mendorong dan menumbuhkan kekuatan. Pemerintah memberikan alat produksi untuk proses penunjang produksi. Bantuan yang diberikan tentunya sangat membantu para pengusaha agar proses produksi sangat cepat dan hasil produksi yang berupa produk-produk usaha orang asli Papua dapat bersaing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu kepala Dinas Koperasi dan UKM mengemukakan bahwa;

".....Pemerintah sangat mendukung para pelaku usaha orang asli Papua, pemerintah berharap dengan adanya bantuan alat produksi mampu meningkatkan hasil produksi dan mampu bersaing dengan produk lain". (Hasil wawancara 16 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa; "..... Bantuan alat produksi sangat penting bagi kami karena dapat membantu mempercepat hasil produksi, karena kalau kita mau beli alat pastilah kita tidak mampu, jadi saya sangat berterima kasih dengan adanya bantuan pemerintah". (Hasil wawancara 12 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa salah satu upaya pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam mendukung UKM orang asli Papua adalah memberikan bantuan produksi pelaku usaha orang asli Papua.

Faktor Penghambat Pemberdayaan UMKM Orang Asli Papua di Kabupaten Biak Numfor.

Program pengembangan UKM sebagai salah satu instrument untuk menaikkan daya beli masyarakat serta memperbaiki ekonomi masyarakat. Pengembangan UKM orang asli Papua menjadi sangat penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir semua lapangan usaha sehingga kontribusi UKM menjadi sangat besar dalam peningkatan pendapatan bagi kelompok masyarakat asli Papua yang memiliki pendapatan rendah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti memperoleh informasi bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan UKM orang asli Papua, yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan berwirausaha

Sumber daya manusia harus memiliki kemampuan yang tidak hanya dituntut untuk bersaing dalam hal memasuki dunia kerja namun juga dapat menghadirkan peluang pekerjaan tersebut bagi masyarakat. Oleh sebab itu sangat penting bagi orang asli Papua untuk didorong agar mampu dan mau berjiwa usaha sehingga menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam memunculkan ide-ide atau gagasan baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu kepala Dinas Koperasi dan UKM mengemukakan bahwa;

".....Pemerintah sangat mendukung para pelaku usaha orang asli Papua, Cuma disini masalahnya itu orang disini itu masih minim pengetahuannya tentang berwirausaha, makanya pemerintah mendorong agar pola pikir untuk berusaha itu terbuka". (Hasil wawancara 16 September 2021).

Lebih lanjut wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa;

"..... Kalau pengetahuan berusaha itu masih kurang sekali, makanya kami sangat mengharap bantuan dan perhatian dari pemerintah". (Hasil wawancara 12 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa salah satu kendala maupun penghambat dalam pemberdayaan orang asli Papua adalah minimnya pengetahuan orang asli Papua tentang berwirausaha.

2. Kurangnya sarana dan prasarana

Faktor sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam menunjang pengembangan UKM. Oleh karena itu, faktor sarana dan prasarana harus mendukung dalam melakukan usaha. Sarana yang dimaksud dalam penelitian ini seperti sarana dalam pemasaran produk, atau sarana dalam proses pembuatan produk.

Berdasarkan wawancara dengan kepala Dinas Koperasi dan UKM mengemukakan bahwa;

".....Pemerintah sudah berusaha memberikan dukungan sarana dan prasarana kepada para pelaku usaha orang asli Papua meskipun masih sangat terbatas, saya sudah usulkan ke pak

bupati untuk membentuk PERUSDA agar nantinya semua produk dari UKM dipasarkan melalui PERUSDA. (Hasil wawancara 16 September 2021).

Lebih lanjut wawancara dengan pelaku UKM orang asli Papua mengemukakan bahwa; ".....Kami sangat mengharapkan bantuan dan perhatian dari pemerintah terutama dukungan sarana dan prasarana serta bantuan modal usaha agar usaha yang kami lakukan bisa berkembang". (Hasil wawancara 12 September 2021).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan maka diperoleh informasi bahwa upaya pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam memberdayakan UKM orang asli Papua dengan memberikan dukungan sarana dan prasarana berupa dalam pemasaran produk, atau sarana dalam proses pembuatan produk masih dianggap minim oleh sebagian pelaku usaha UKM orang asli Papua.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan maka penulis,

- a. Peran pemerintah daerah kabupaten Biak Numfor melalui Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kabupaten Biak Numfor dalam memberdayakan UKM orang asli Papua, yaitu:
 - 1) Penyuluhan atau Pelatihan.
 - 2) Bantuan modal usaha.
 - 3) Bantuan promosi dan pemasaran.
 - 4) Bantuan alat produksi.
- b. Faktor yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan UKM orang asli Papua, yaitu:
 - 1) Kurangnya pengetahuan berwirausaha
 - 2) Kurangnya sarana dan prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Christofer Ondang, Frans Singkoh, Neni Kumayas. 2019. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Permemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kabupaten Minahasa (Suatu Studi Kasus Di Dinas Koperasi Dan UKM)." *Eksekutif* 3(3): 1–10.
- Devi Chandra Nirwana, Muhammadiyah, Muhajirah Hasanuddin. 2017. "Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Menengah Di Kabupaten Enrekang." *Jurnal Administrasi Publik* 3(1): 1–14.
- Dewi Wuryandani, Hilma Meilani. 2013. "Peranan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 4(1): 103–15.
- Dwi Prasetyo Hadi. 2015. "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Sumber Daya Lokal Dalam Rangka Millenium Development Goals 2015 (Studi Kasus Di PNPM-MP Kabupaten Kendal)." *Jurnal Civis* 5(1): 725–36.
- Dwi Pratiwi Kurniawati, Bambang Supriyono, Imam Hanafi. 2013. "Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Usaha Ekonomi (Studi Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)." *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1(4).
- Edyanto, Karsiman. 2018. "Leadership Bupati Dalam Pembangunan Di Kabupaten Tambrau (Studi Kepemimpinan Bupati Tambrau)." *Sosio e-kons* 10(2): 143–49.
- Leiwakabessy, Pitter, and Fensca Fenolisa Lahallo. 2019. "Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Sebagai Solusi Dalam Meningkatkan Produktivitas Usaha Pada UMKM Kabupaten Sorong." *J-Depace (Journal of Dedication to Papua Community)* 1(1): 11–21.

- Musa. 2017. "Optimalisasi Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat: Sebuah Tawaran Dalam Mengentaskan Kemiskinan." *Mawa'izh*, 8(1): 107–25.
- Ras, Atma. 2013. "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan." *Socius* 14(10).
- Safri Miradj, Sumarno. 2014. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin, Melalui Proses Pendidikan Nonformal, Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Di Kabupaten Halmahera Barat." - *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1).